

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Menu

Cari



Berlangganan

Masuk

KEPRESIDENAN

Bakti Para Presiden Selepas Meninggalkan Istana

Berakhirnya masa jabatan tak membatasi para presiden RI melanjutkan pengabdianya. Segala pemikiran dan pengalaman bisa diwariskan untuk membantu bangsa.

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Daftar Gratis

Audio Berita 16 menit

Oleh Nino Citra Anugrahanto

21 Feb 2026 07:07 WIB · Politik & Hukum



KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Megawati Institute

Sejumlah presiden yang pernah memimpin Indonesia tidak berhenti mengabdikan diri bagi negara meskipun masa jabatannya berakhir. Dari luar lingkaran kekuasaan, para tokoh bangsa tersebut melanjutkan pengabdian pada ranah gagasan dengan mendirikan

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Sebuah miniatur pesawat berwarna putih biru terpajang di salah satu sudut ruangan The Habibie Center, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Tetuko—nama kecil tokoh pewayangan Gatotkaca—begitulah Presiden ke-2 RI Soeharto menamainya.

Nama itu disematkan untuk pesawat karya anak bangsa bernomor seri CN-235 yang diproduksi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN), yang ketika itu dipimpin BJ Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi.



KOMPAS/RIZA FATHONI

Miniatur pesawat di Gedung The Habibie Center, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Karya di dunia dirgantara itu baru secuil warisan Habibie yang kemudian menggantikan Soeharto menjadi Presiden ke-3 RI. Kesan apik kembali Habibie tinggalkan selama menjabat Kepala Negara. Keberadaannya sebagai pucuk pemimpin negeri menggoreskan warna pemerintahan yang lebih demokratis.

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



demokratis dengan kemunculan banyak partai, membatasi masa jabatan presiden, mendorong terjadinya otonomi daerah, hingga memulai pemisahan TNI dan Polri dari kerangka dwifungsi ABRI.

Dengan mendirikan think tank, hal itu menunjukkan bahwa dia (presiden yang pernah memimpin) tidak lagi menempatkan dirinya sebagai politisi yang partisan, tetapi sebagai seorang negarawan.



Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Iklan

Semua itu dilakukan Habibie dalam masa jabatan yang hanya berlangsung satu tahun lima bulan, atau sekitar 500 hari saja. Dinamika politik yang terjadi waktu itu mengharuskannya lengser dari kursi kepresidenan. Alih-alih mengutak-atik cara untuk memperpanjang kekuasaan, Habibie memilih tunduk pada konstitusi dan mencari jalur pengabdian lain.

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Data Lembaga *Think Tank*



Pendiri: Presiden ke-3 RI **BJ Habibie** dan keluarganya

Tahun didirikan: 1999

Visi: menjadi organisasi independen, nonpemerintah, dan nonprofit untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang berdasar pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama.

Misi:

- Mewujudkan masyarakat demokratis, baik secara kultural maupun struktural yang menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengembangkan isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia.
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan mendorong penyebaran teknologi.

Situs resmi: habibiecenter.or.id

Megawati Institute



Pendiri: Presiden ke-5 **Megawati Soekarnoputri**

Tahun didirikan: 2009

Misi:

- Menerjemahkan ideologi Pancasila menjadi ideologi kerja
- Menerjemahkan ide-ide dan gagasan Sukarno ke dalam kebijakan PDI-P
- Menerjemahkan pelaksanaan 4 pilar (NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Merangkul kaum cendekiawan nasionalis

Visi: menjadi lembaga *think tank* yang fokus pada ideologi Pancasila dengan cara membumikan nilai-nilai Pancasila (1 Juni 1945) sebagai ideologi bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Mekanisme kerjanya merangkul pemikiran kaum cendekiawan, baik yang terafiliasi dengan PDI-Perjuangan maupun kelompok

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.





YUDHOYONO INSTITUTE

LIBERTY - PROSPERITY - SECURITY

Pendiri: Presiden ke-6

Susilo Bambang Yudhoyono

Tahun berdiri: 2017

Visi: menjadi lembaga *think tank* yang mendorong terciptanya Indonesia yang lebih merdeka, sejahtera, dan aman melalui jalur produksi pemikiran. Lembaga ini sekaligus didedikasikan untuk menuangkan sederet pengalaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama menjabat untuk mengatasi persoalan-persoalan strategis bangsa.

Misi: menyiapkan pemimpin generasi masa depan yang memiliki pandangan strategis untuk mengelola isu lokal, nasional, maupun internasional guna menghadapi berbagai tantangan abad ke-21.

Strategi:

- Menginspirasi dan memperkaya pengetahuan anak-anak muda Indonesia dengan pemahaman mendalam terkait tren dan kondisi yang membentuk pilihan kebijakan dan pendekatan inovatif terkait sederet tantangan bangsa.
- Secara aktif mengadakan diskusi dengan para pemangku kepentingan terentang dari pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat sipil.
- Menyusun kajian kebijakan publik dengan tujuan menghasilkan ide-ide solutif dan mendorong kolaborasi berbasis solusi atas permasalahan-permasalahan bangsa.

Sumber: Situs web The Habibie Center, Megawati Institute, dan The Yudhoyono Institute



INFOGRAFIK: GUNAWAN

Infografik data lembaga Think Tank: The Habibie Center, Megawati Institute, dan The Yudhoyono Center.

”Kebetulan Bapak (Habibie) dekat dengan Presiden (ke-39 Amerika Serikat) Jimmy Carter. Keduanya sering bertemu, entah di Indonesia atau Amerika Serikat. Sekali waktu, setelah bapak lengser, mereka sempat berbincang dan diusulkan membuat lembaga nonprofit yang masih bergerak ke isu-isu strategis seperti Carter Center,” kata Ketua Dewan Pembina The Habibie Center (THC) Ilham Akbar Habibie saat diwawancarai di kantornya, The Habibie Center, Jakarta.

Berangkat dari usulan itu, Habibie dan keluarganya mendirikan The Habibie Center pada 10 November 1999. Semua anggota keluarga

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



”Karena ada keinginan untuk melanjutkan apa yang menjadi semangat atau kontribusi Bapak kepada negara bangsa ini, selain dari teknologi memang demokratisasi. Namun, masa jabatan Bapak hanya 512 hari dengan banyak alasan yang melatarinya. Lalu, lembaga ini menjadi wahana untuk melanjutkan itu,” kata Ilham.



KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ

Presiden ke-3 RI BJ Habibie membaca salah satu koleksinya di perpustakaan Habibie Ainun, Jakarta, 11 Agustus 2014.

Ilham menceritakan, tujuan berdirinya lembaga itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah visi, yakni Demokrasi Harus Berlanjut. Ini sejalan dengan upaya demokratisasi yang dilakukan Habibie semasa kepemimpinannya. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkannya merupakan fondasi awal negara ini memasuki era demokrasi.

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Untuk itu, lanjut Ilham, demokrasi sekaligus diposisikan sebagai nilai utama guna mengkaji berbagai isu strategis yang menjadi perhatian lembaga. Sejumlah bidang kajian itu, antara lain, demokrasi dan hak asasi manusia; demokrasi, ekonomi, dan ekologi; serta demokrasi, sains, teknologi, dan inovasi.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Iklan

”Sempat banyak orang salah mengerti semasa awal lembaga ini berdiri. The Habibie Center dikira fokus saja pada pengembangan teknologi, padahal tidak seperti itu. Di sini lebih menekankan demokrasi. Adanya inovasi yang baik juga memerlukan demokrasi, bukan?” kata Ilham.



KOMPAS/RIZA FATHONI

Gedung The Habibie Center, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



masa jabatan yang diembannya terbilang pendek. Dalam perjalanannya, dugaan-dugaan itu terbantahkan dengan sendirinya.

”Setelah 25 tahun lebih kami bekerja, memang akhirnya Habibie Center selalu dilihat sebagai *think tank*, NGO, atau yayasan profesional yang tidak partisan. Kami benar-benar sejati mendukung demokratisasi negara kita dari segala aspek. Itu hal yang selalu kami perjuangkan karena tidak jatuh dari langit,” kata Ilham.

Terkait hasil kerja lembaga, jelas Ilham, wujudnya bermacam-macam, terentang dari kajian kebijakan, konferensi, seminar, hingga diskusi publik. Di sisi lain, upaya mewariskan pemikiran Habibie turut ditempuh dengan menulis buku. Sedikitnya 64 judul buku yang menceritakan sosok Habibie telah diterbitkan.



KOMPAS/LASTI KURNIA

Presiden ke-3 RI BJ Habibie (kiri) bergurau dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat berjumpa pada Dialog Kebangsaan, Mengelola Keragaman, Meneguhkan Keindonesiaan di Auditorium LIPI, Jakarta, 15 Agustus 2017.

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



mempertemukan berbagai kalangan untuk membahas situasi demokrasi terkini.

Baca Juga

Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam

Isu itu kian relevan mengingat tren kemunduran demokrasi tengah dialami banyak negara di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Menariknya, demokrasi tidak melulu dilihat dari kacamata politik, tetapi juga sektor lainnya, seperti teknologi, digital, dan ekologi.

”Tujuan besarnya adalah apa yang kita sudah miliki harus kita perbaiki. Maksud saya, kualitas demokrasi dari negara kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita menjadi negara yang maju pada tahun 2045,” kata Ilham soal harapan ke depan mengenai lembaga The Habibie Center.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Iklan

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.





KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana Megawati Institute di Menteng, Jakarta, Senin (26/1/2026). Megawati Institute adalah lembaga nonprofit didirikan oleh presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri sebagai think tank yang fokus pada ideologi kerja Pancasila.

Jejak Habibie dijalani pula oleh sejumlah presiden penerusnya. Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri termasuk salah seorang di antaranya. Pada 2009, setelah lengser dari kursi kepala negara, ia mendirikan Megawati Institute. Lembaga itu didirikan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan posisi politik Megawati yang tak lagi berkuasa.

[Baca Juga](#)

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Selama 2014-2024, kajian kebijakan sempat tidak terlalu aktif dijalankan Megawati Institute. Pasalnya, sejumlah anggota lembaga itu ditarik mengisi jabatan-jabatan pemerintahan, yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo, yang kala itu masih berstatus kader PDI Perjuangan. Untuk itu, sumbangsih pemikiran disalurkan secara langsung.

Kendati demikian, beberapa tahun terakhir, Megawati Institute menggeser fokusnya ke ranah pendidikan dengan membuat program bernama Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Sejalan dengan namanya, program itu mengajak pesertanya untuk menyelami pemikiran para tokoh bangsa.



KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Direktur Eksekutif Megawati Institute Hilmar Farid

"Karena ini penting? Mungkin kita bisa tentukan dulu dulu dulu"

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Baca Juga**Di Rakernas, PDI-P Fokus Soroti Krisis Ekologis**

Dengan pergantian rezim pemerintahan, Hilmar diminta Megawati untuk merevitalisasi fungsi lembaga sebagai badan kajian kebijakan. Namun, sasarannya bukan pemerintah pusat. Secara khusus, ia diminta menyusun kajian kebijakan bagi pemerintahan daerah yang jabatannya banyak diemban kader-kader dari PDI-P.

Saat ini, jelas Hilmar, isu krusial yang sedang menjadi perhatian lembaganya ialah mengenai lingkungan dan ekologi. Urgensinya semakin nyata terbukti dari sejumlah bencana alam akibat kerusakan lingkungan yang terjadi beberapa waktu belakangan. Sebagai pemangku kepentingan tingkat dasar, pemerintah daerah bisa diadvokasi guna menyusun kebijakan yang berpihak kepada lingkungan, sekaligus memberikan keadilan sosial.

"Ini menjadi semacam tanggung jawab moral bagi beliau (Megawati). Terlebih lagi, beliau itu punya pengaruh politik, punya partai pemenang pemilu, dan pernah menjadi presiden. Buat beliau, mungkin merasa harus melakukan sesuatu, bagaimana Megawati Institute bisa berkontribusi pada gagasan pembangunan," sebut Hilmar.

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.





Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Abdulrahman, Riyadh Arab Saudi, Senin (9/2/2026). Universitas Princess Nourah memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati atas kepeloporannya dalam kepemimpinan perempuan di Indonesia.

Sosok lain yang juga mendirikan lembaga pemikir serupa ialah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. The Yudhoyono Institute begitu ia menamai lembaga pemikir yang didirikannya pada 2017 itu. Lewat lembaganya itu, Yudhoyono ingin melanjutkan kontribusinya bagi bangsa dengan mewariskan pemikiran dan pengalamannya memimpin Indonesia selama dua periode, 2004-2014, untuk generasi penerus.

Direktur The Yudhoyono Institute Mira Permatasari menjelaskan, saripati pemikiran Yudhoyono terbagi dalam tiga hal, yaitu *liberty* (kebebasan), *prosperity* (kemakmuran), dan *security* (keamanan). Ketiganya saling berkelindan dan melengkapi satu sama lain demi mengantarkan negeri ini pada kejayaannya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang diadakan lembaga itu selalu berpatokan pada nilai-nilai tersebut.

Baca Juga

**Gandeng 35 Musisi, SBY Merilis Video Musik
Berjudul "Save Our World"**

Beberapa kegiatan yang dimaksud antara lain kuliah umum, diskusi publik, hingga dialog rakyat. Dari sederet agenda, kuliah umum termasuk yang paling sering dihelat. Bahkan, sedikitnya ada 20 provinsi yang pernah didatangi Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga putra sulung Yudhoyono, untuk memberikan kuliah umum di berbagai kampus. Bukan hanya Agus, sesekali pidato kunci juga diberikan langsung oleh Yudhoyono dalam acara-acara itu.

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.





KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober 2024.

”Lembaga ini diharapkan bisa berkontribusi kepada Indonesia (dalam) mencetak kader-kader pemimpin bangsa. Anak-anak muda yang paham apa yang terjadi di dunia ini, supaya Indonesia bisa bertahan dalam berbagai tantangan global,” papar Mira mengenai dibidiknya anak muda sebagai sasaran kegiatan.

Baca Juga**Saat Politik Terkadang Gagal Menjangkau, SBY Pun Memilih Jalan Seni**

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



internasional yang beranggotakan mantan kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara demokratis, di Berlin, Jerman. Dalam ajang itu, Yudhoyono mengusulkan gagasan agar para pemimpin dunia menurunkan ego dan saling bekerja sama guna mengatasi ancaman krisis global.

Selain itu, The Yudhoyono Institute juga bekerja sama dengan universitas mancanegara, seperti Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Stanford di AS. Agenda yang digelar berupa diskusi terarah mengenai tema ekonomi, kesejahteraan, hingga geopolitik. Dalam ajang itu, Yudhoyono dan Agus juga pernah diminta memberikan pidato atau pandangannya mengenai isu yang diusung.



KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) bersiap berfoto bersama para musisi yang terlibat dalam pembuatan video musik "Save Our World" dalam acara peluncuran video musik tersebut di Jakarta, 1 Juli 2025.

Dalam jangka panjang, ungkap Mira, The Yudhoyono Institute ingin mendirikan lembaga pendidikan formal sebagai bentuk keterlibatan

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



umum hingga seminar guna menjangkau lebih banyak anak-anak muda.

”Kami ingin mempersiapkan anak-anak muda supaya bangsa ini menjadi unggul. Tantangan masa depan akan semakin kompleks. Jadi, kita tidak bisa berpangku tangan, apalagi kita akan menghadapi bonus demografi (menuju) 2045. Jangan sampai ini hanya menjadi angan-angan,” kata Mira.

Baca Juga

Gus Dur dan Teladan Kekuasaan untuk Rakyat

Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga mempunyai lembaga pemikir serupa bernama Wahid Institute, yang kini lebih dikenal dengan nama Wahid Foundation. Merujuk laman Wahid Foundation, visi lembaga itu adalah terwujudnya cita-cita intelektual Gus Dur untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera dan umat manusia yang berkeadilan sosial dengan menjunjung tinggi pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan HAM yang diinspirasi nilai-nilai Islam.



Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), Perkumpulan Filantropi Indonesia (PFI), dan Koalisi Seni Indonesia (KSL) mengadakan acara diskusi di Sekretariat The Wahid Institute, Jakarta, 23 Juni 2013.

Wahid Foundation mengusung misi mengembangkan, merawat, dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran. Berikutnya, mengembangkan dialog antara budaya lokal dan internasional untuk memperluas harmoni Islam dengan berbagai kebudayaan.

Misi selanjutnya adalah mendorong beragam inisiatif untuk memperkuat masyarakat sipil dan tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia dalam penguatan demokrasi. Selain itu juga mempromosikan partisipasi aktif dari beragam kelompok agama dalam membangun dialog kebudayaan dan dialog perdamaian.

Lembaga yang didirikan pada 7 September 2004 ini pun memiliki misi mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.



Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.



Dihubungi terpisah, peneliti senior dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli menyebut, fenomena pembentukan lembaga *think tank* oleh mantan kepala negara terjadi hampir di seluruh dunia. Menurut Lili, jalan itu semestinya ditempuh para mantan presiden agar tak melulu sibuk berpolitik praktis.

Baca Juga

“The President's Club” ala Prabowo, Mungkinkah Terwujud?

Gagasan dan pemikiran para mantan presiden dapat dijaga agar tidak hilang. Lembaga-lembaga pemikir itu lahir untuk merawat ide besar dan visi mereka dalam bentuk berbagai kajian kebijakan yang bisa membantu perjalanan bangsa mengarungi zaman. Ini membuat mereka terus bisa berkontribusi bagi negerinya kendati tidak lagi berada dalam lingkaran kekuasaan.

”Dengan mendirikan *think tank*, itu menunjukkan bahwa dia (presiden yang pernah memimpin) tidak lagi menempatkan dirinya sebagai politisi yang partisan, tetapi sebagai seorang negarawan. Mereka tampil sebagai sosok intelektual, simbol moral, dan tokoh informal yang memberikan pandangan-pandangan strategis bagi bangsa dan negara,” kata Lili.

Pada akhirnya, kekuasaan memang harus dibatasi. Namun, bakti seorang anak bangsa tidak akan pernah berakhir. Lebih-lebih bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai pucuk pemimpin negeri. Sumbangsiah pemikiran dan pengalaman semasa memimpin akan selalu berguna mengantarkan bangsa ini menuju kemajuan.

Daftar untuk akses lebih banyak artikel mendalam dan komprehensif.

